

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja sama perdagangan regional telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung integrasi ekonomi negara-negara di suatu kawasan. Integrasi yang terjalin melalui pembentukan institusi-institusi ini membantu negara-negara untuk mengurangi hambatan perdagangan, mobilitas produksi, dan peningkatan aktivitas ekonomi di antara anggota.¹ Institusi regional pada umumnya dapat disebut dengan institusi multilateralisme yang mana didasarkan pada tiga prinsip-prinsip tertentu, yaitu: ketidakterpisahan (*indivisibility*) yang berarti multilateralisme harus didasarkan pada kebaikan bersama tidak hanya pihak-pihak tertentu, prinsip umum yang mengatur secara non-diskriminatif dan inklusif (*generalized organizing principles*), dan dilandaskan pada kepercayaan dan komitmen jangka panjang untuk saling memberi dan menerima (*diffuse reciprocity*).² Dengan prinsip ini, institusi multilateralisme diharapkan mencerminkan kesetaraan antar negara anggota.

Namun dalam praktiknya, institusi multilateralisme tidak selalu berlangsung dalam penyebaran kekuasaan yang seimbang. Lisa Martin menyoroti salah satu permasalahan dalam institusi multilateralisme yaitu adanya ketimpangan atau asimetri kekuasaan dan kepentingan yang menghasilkan ketidakpuasan bagi pihak tertentu di dalam institusi tersebut. Terjadinya situasi ini dipicu oleh adanya daya tawar lebih

¹ Vigninou Gammadigbe, "Is Regional Trade Integration a Growth and Convergence Engine in Africa?," *IMF Working Papers*, 2021.

² Atsushi Tago, "Multilateralism, Bilateralism, and Unilateralism in Foreign Policy," *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2017, 1–2.

besar oleh negara yang lebih kuat dalam memengaruhi arah kebijakan dan substansi perjanjian yang disepakati.³

Perilaku AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump (2017-2021) dalam proses renegotiasi North American Free Trade Agreement (NAFTA) mencerminkan adanya dinamika asimetri kekuasaan dan kepentingan di dalam kerja sama regional tersebut. NAFTA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas regional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Amerika Utara seperti AS, Kanada, dan Meksiko. Perjanjian ini dibentuk dengan bertujuan menghapus hambatan dagang dan memfasilitasi mobilitas barang dan jasa antar negara di kawasan, mempromosikan bentuk kompetisi perdagangan bebas yang adil, meningkatkan peluang investasi antar anggota, serta membangun sebuah kerangka kerja sama trilateral, regional dan multilateral yang lebih lanjut guna memperluas dan meningkatkan manfaat dari perjanjian ini.⁴ Namun di awal pembentukannya, NAFTA sudah dihiasi dengan ketimpangan kekuatan antar anggota, yang mana di awal tahun 1990-an, AS baru saja mengalahkan Uni Soviet pasca Perang Dingin yang menjadikannya satu-satunya kekuatan besar dunia (unipolar). Kondisi AS ini bertimpangan dengan kondisi Meksiko yang baru saja keluar dari kebijakan ekonomi proteksionisnya sejak 1930an hingga pertengahan 1980an.⁵ Sedangkan Kanada sudah memiliki ekonomi terbuka dan memiliki perjanjian perdagangan dengan AS.

³ Lisa L Martin, "Interests , Power , and Multilateralism," *International Organization* 46, no. 4 (1992).

⁴ Government of Canada, North American Free Trade Agreement (NAFTA), 30 November 2016, <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/01.aspx?lang=eng>

⁵ M. Angeles Villarreal, "NAFTA and the Mexican Economy," *Congressional Research Service*, 2010.

Ketimpangan tersebut semakin terlihat jelas di masa pemerintahan Presiden Trump. Di tahun 2017, setelah 24 tahun beroperasi, NAFTA, yang dulunya dipandang sebagai simbol komitmen terhadap liberalisasi perdagangan regional dan kerjasama multilateral di Amerika Utara, tiba-tiba menjadi sasaran kritik tajam dari pemerintahan AS, yang menyebutnya sebagai "perjanjian terburuk" yang pernah ditandatangani oleh AS dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut merugikan ekonomi domestiknya.⁶ Pemerintahan Trump kemudian mengancam secara terbuka akan menarik diri dari NAFTA apabila tidak segera dilakukannya renegotiasi terhadap perjanjian tersebut.⁷ Setelah satu tahun perumusan perjanjian baru, renegotiasi NAFTA akhirnya disetujui oleh kedua negara mitra lainnya setelah diwarnai serangkaian ketegangan dan pemberian penekanan oleh AS kepada Kanada dan Meksiko, seperti penetapan tarif sebesar 25% terhadap baja dan 10% terhadap aluminium.⁸ Aksi Trump tersebut mencerminkan suatu strategi negosiasi yang tegas dan berorientasi pada kepentingan nasionalnya, antara lain melalui ancaman penarikan diri dari NAFTA dan penerapan tarif terhadap baja dan aluminium. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisi tawar AS dalam proses renegotiasi.

Akhirnya di tahun 2020, United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) resmi berlaku dan menggantikan NAFTA. Beberapa perubahan di dalam pasal pun

⁶ "Remarks by President Trump on the United States-Mexico-Canada Agreement – the White House," Archives.gov (The White House, 2018), <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-President-trump-united-states-mexico-canada-agreement>.

⁷ Harvard Law School, "Renegotiation Lesson from the NAFTA Talks", 18 Maret 2025. <https://www.pon.harvard.edu/daily/dealmaking-daily/redoing-the-deal-lessons-from-the-nafta-renegotiations-nb/>

⁸ Christopher Sands, "Trump Tariff Threats: To What End?" *GBV Wilson Center*, 2 Desember 2024. <https://gbv.wilsoncenter.org/article/trump-tariff-threats-what-end>

dilakukan, seperti penetapan *sunset clause* yang tertuang dalam pasal 34 ayat 7 yang berisi akan mengakhiri perjanjian setelah 16 tahun setelah diresmikan dengan dilakukannya tinjauan ulang di tahun ke-6.⁹ Selain itu, di dalam pasal 32 ayat 10 dijelaskan bahwa negara anggota yang ingin menjalin FTA dengan negara lain di luar USMCA wajib memberikan informasi sebanyak mungkin terkait FTA tersebut sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum negosiasi dimulai.¹⁰ Ketentuan-ketentuan (*provisions*) ini merupakan inovasi yang tidak ditemukan di dalam NAFTA, yang mana mengindikasikan kewaspadaan AS terkait kesesuaian USMCA berjalan dengan keuntungan yang didapatkan AS nantinya.

Renegosiasi NAFTA menuju USMCA menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana negara dengan kekuatan dominan dapat memanfaatkan ketimpangan kekuasaan dalam proses perundingan internasional, tanpa harus keluar dari kerangka kerjasama yang ada. Selama ini, kajian mengenai renegosiasi NAFTA cenderung berfokus pada aspek ekonomi atau kebijakan perdagangan, sementara pembahasan mengenai perilaku negosiasi dan strategi politik luar negeri AS dalam konteks asimetri kekuasaan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana AS menggunakan instrumen kekuasaan dalam proses renegosiasi perjanjian regional, serta bagaimana dinamika tersebut merefleksikan hubungan antarnegara dengan tingkat kekuatan yang berbeda di dalam institusi multilateral.

⁹ the United State-Mexico-Canada, "Chapter 34 Final Provisions," Office of the United States Trade Representative § (2020).

¹⁰ the United State-Mexico-Canada, "Chapter 32 Exceptions and General Provisions" (2020).

1.2 Rumusan Masalah

Renegosiasi NAFTA yang menghasilkan USMCA menunjukkan asimetri kekuasaan antara negara kuat dan negara lebih lemah dalam dinamika kerja sama perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. Sejak masa kampanye kepresidenannya di tahun 2016, Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk merenegosiasi NAFTA karena dianggap hanya merugikan ekonomi AS. Di tengah proses renegosiasi berlangsung, ketegangan di antara ketiga negara pun tidak terhindarkan. Gesekan diantara ketiga negara sudah dimulai sejak Trump mengancam akan menarik diri dari NAFTA, dan diperparah saat penerapan tarif oleh AS kepada Kanada dan Meksiko. Tidak hanya berhenti disitu, Kanada dan Meksiko kemudian juga menerapkan tarif pembalasan kepada AS. Interaksi ini dipandang telah menjauhkan proses renegosiasi NAFTA dari tercapainya kesepakatan bersama menuju pembentukan USMCA. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama, empat bulan setelah tarif AS berlaku, Meksiko akhirnya menyetujui USMCA diikuti oleh Kanada pada bulan berikutnya. Hal ini menarik peneliti untuk memahami bagaimana AS dapat mengubah situasi perang tarif tersebut dan memengaruhi keputusan Meksiko dan Kanada untuk menyetujui pembentukan USMCA beserta ketentuan-ketentuan baru yang ada di dalamnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti mengusulkan pertanyaan yaitu “Bagaimana perilaku AS dalam proses renegosiasi NAFTA menuju pembentukan USMCA?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku AS dalam mencapai kesepakatan bersama terhadap renegotiasi NAFTA menjadi USMCA.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami perilaku negara hegemon dalam kerjasama perdagangan regional, terutama kerjasama yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang, serta dapat memperkaya literatur mengenai kajian terhadap *suasion game* dalam menganalisis interaksi antar negara di dalam institusi multilateral.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan yang terlibat dalam kerja sama regional maupun global dalam berdinamika di dalam institusi yang terdapat asimetri kekuatan di dalamnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam upaya mencari jawaban dan memperdalam analisis penelitian ini, peneliti telah menghimpun berbagai literatur dan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk dijadikan acuan dalam mendukung analisis penelitian. Adapun literatur tersebut antara lain:

Literatur pertama merujuk pada artikel berjudul *“Hard Times: The United States and Mexico in NAFTA’s “Renegotiation” Process”*. Artikel jurnal ini membahas

proses renegotiasi NAFTA yang menghasilkan USMCA.¹¹ Robert Menezes, Karina Mariano, dan Flavio Contrera sebagai penulis artikel jurnal ini menyoroti ketegangan di dalam proses renegotiasi NAFTA, khususnya tekanan yang diberikan AS selama proses renegotiasi terhadap Meksiko. Penulis menjelaskan bahwa adanya ketidakseimbangan atau asimetri kekuatan dan kekakuan struktur kelembagaan di dalam NAFTA berperan besar dalam tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan AS selama proses renegotiasi.

Secara ekonomi, Meksiko memiliki keterikatan hubungan yang sangat dekat dengan AS sebagai dampak dari keanggotaannya di dalam NAFTA. Keanggotaannya ini sangat berkontribusi dalam meningkatnya kegiatan ekspor Meksiko hingga menempatkannya berada di posisi ke-13 di dunia. Bahkan Meksiko berhasil menjadi pendorong pertumbuhan ekspor tahunan tertinggi di Amerika Latin. Hal ini lah yang menurut AS bahwa Meksiko adalah negara yang paling diuntungkan dari perjanjian ini. Akan tetapi, pernyataan tersebut bertentangan dengan kenyataan di lapangan, keberhasilan ini masih belum bisa memperbaiki tingkat upah buruh dan kemajuan teknologi di Meksiko, selain itu, kemiskinan masih terus meningkat. Menyadari ketergantungan ini, memberikan AS kekuatan lebih untuk menekan Meksiko selama proses renegotiasi, meninggalkan ruang yang sempit bagi Meksiko untuk bernegosiasi terhadap keputusan AS tersebut. Adapun perbedaan penelitian ini dengan artikel jurnal ini terletak pada objek penelitian, yang mana artikel ini berfokus pada ketimpangan

¹¹ Roberto Goulart Menezes, Karina Lilia Pasquariello Mariano, and Flávio Contrera, "Hard Times: The United States and Mexico in NAFTA's 'Renegotiation' Process," *Contexto Internacional* 44, no. 2 (2022): 1–21.

kekuatan antara AS dan Meksiko sangat ketara sehingga AS mampu mengeluarkan kebijakan yang menempatkan Meksiko pada situasi yang sulit selain mengikuti keputusan Trump untuk merenegosiasi NAFTA. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk-bentuk tindakan sepihak AS mempengaruhi keputusan disetujuinya renegosiasi NAFTA oleh kedua negara mitra, yaitu Kanada dan Meksiko.

Kedua, peneliti merujuk pada artikel jurnal berjudul “*Unilateralism and Competitive Multilateralism in Gray-zone Conflict*” yang membahas dinamika konflik di zona abu-abu atau *gray-zone conflict* dalam fenomena hubungan internasional kontemporer.¹² Artikel yang ditulis oleh Dani Belo dan David Carment ini fokus pada strategi unilateral dan *competitive multilateralism* yang diterapkan oleh AS dan Rusia. Penulis berpendapat bahwa dalam era multipolar saat ini, negara-negara besar cenderung mengandalkan pendekatan unilateral untuk mempertahankan pengaruh mereka, baik terhadap lawan maupun sekutu. Melalui berbagai studi kasus seperti konflik di Ukraina, Suriah, serta sanksi terhadap proyek Nord Stream II, artikel ini menunjukkan bagaimana strategi *coercive unilateralism* digunakan tidak hanya untuk menghadapi musuh, tetapi juga untuk mendisiplinkan sekutu yang dianggap menyimpang dari kepentingan strategis nasional masing-masing negara. Belo dan Carment mengemukakan bahwa penggunaan taktik *gray-zone*—termasuk perang informasi, dukungan terhadap aktor non-negara, tekanan ekonomi, dan operasi militer terbatas—telah menjadi sarana utama bagi AS dan Rusia untuk memaksimalkan

¹² Dani Belo and David Carment, “Unilateralism and Competitive Multilateralism in Gray-Zone Conflict A Comparison of Russia and the United States,” *US Air Force Wild Blue Yonder Journal* 25, no. 1 (2020): 1–25.

relative gains di lingkungan internasional yang semakin kompleks. Mereka juga menekankan bahwa strategi ini membawa konsekuensi jangka panjang yang signifikan, seperti terkikisnya kepercayaan antarsekutu, meningkatnya ketegangan dalam aliansi multilateral, dan melemahnya kapasitas kolektif dalam resolusi konflik.

Artikel yang dipublikasikan pada tahun 2020 ini membantu peneliti memahami bagaimana penggunaan kebijakan koersif kepada lawan dan kompetitif multilateralisme kepada sekutu oleh negara besar sebagai alat untuk melancarkan upayanya dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Adapun perbedaan antara artikel ini dengan peneliti terdahulu pada cakupan pembahasan, Belo dan Carment membahas perilaku negara besar di dalam suatu sistem keamanan internasional sedangkan peneliti mengambil objek dalam sistem perdagangan internasional.

Literatur rujukan ketiga dalam penelitian ini yaitu karya Agnese Pacciardi, Kilian Spandler dan Fredrik Söderbaum yang berjudul “*Beyond exit: how populist governments disengage from international institutions*”.¹³ Artikel jurnal ini menyoroti bagaimana pemerintahan populis tidak hanya menggunakan jalur formal seperti penarikan diri (*exit*) dari organisasi internasional, tetapi juga mengembangkan strategi *disengagement beyond exit* yang lebih halus namun sistematis. Penggunaan kata pemerintahan populis atau *populist governments* mengacu pada kondisi dimana suatu pemerintahan oleh tokoh atau kelompok politik yang membawa gagasan rakyat sebagai prioritas utama dan menentang pihak-pihak yang dianggap merugikan rakyat sehingga

¹³ Agnese Pacciardi, Kilian Spandler, and Fredrik Söderbaum, “Beyond Exit: How Populist Governments Disengage from International Institutions,” *International Affairs* 100, no. 5 (2024): 2025–45.

dalam proses pengambilan keputusan cenderung mengedepankan keputusan yang populer secara politik, tidak peduli jika keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip ataupun norma baik itu di level domestik maupun kerja sama internasional. Penulis menjelaskan sikap pemerintahan populis yang dianggap tidak konsisten karena adanya dorongan yang kontradiksi. Di satu sisi, mereka menunjukkan sikap anti-elite global untuk menjaga citra yang berpihak pada rakyat dan di sisi lain, kepentingan praktis seperti ketergantungan ekonomi, pencitraan internasional, serta tekanan domestik dan internasional membuat mereka tetap terlibat secara strategis tanpa benar-benar keluar.

Dalam artikel jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal *International Affairs* tahun 2024 ini, penulis menjelaskan perilaku pemerintahan populis dalam menjauh dari lembaga internasional ke dalam empat cara: *Criticism*, *extortion*, *obstruction*, dan *exit*. Dengan menggunakan studi komparatif terhadap pemerintahan Orbán di Hungaria dan Trump di AS, tulisan ini menghasilkan bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemerintahan populis pada dasarnya tidak selalu lebih memilih menarik diri. Sebaliknya, kebijakan luar negeri mereka dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara radikalisme dan pragmatisme, menghasilkan berbagai cara penarikan diri yang tidak hanya dalam bentuk keluar dari institusi melainkan lebih mengandalkan cara lain seperti *criticism*, *extortion*, dan *obstruction*, tidak lain demi mempertahankan keuntungan keanggotaan. Dengan demikian pendekatan populis terhadap lembaga internasional bersifat situasional dan penuh perhitungan strategis.

Tulisan ini secara umum membahas sikap suatu pemerintahan negara (tipe populis) dalam institusi internasional yang menurut penulis telah mengganggu nilai multilateralisme yang ada. Ditemukan bahwa cara pemerintahan populis merusak nilai

multilateralisme tidak hanya dengan keluar (*exit*), namun melebihi daripada itu. Oleh karena itu, tulisan ini membantu peneliti dalam memahami perilaku pemerintahan populis - yang dalam tulisan ini membahas pemerintahan Trump, begitu juga penelitian ini - yang telah merusak nilai multilateralisme dalam institusi internasional.

Artikel jurnal berikutnya yaitu karya Eugénia C. Heldt, Henning Schmidtke & Omar Serrano Oswald yang berjudul “*Multilateralism à la carte: how China navigates global economic institutions*”, membahas keterlibatan Tiongkok dalam institusi ekonomi global.¹⁴ Penulis menyoroti sikap samar Tiongkok dalam institusi ekonomi multilateral, yang mana tidak sepenuhnya mendukung juga tidak berupaya mengubahnya. Tiongkok dianggap melakukan ‘*multilateralism à la carte*’ - mendukung kerja sama sepenuhnya saat sejalan dengan kepentingan nasionalnya, melakukan perlawanan terhadap tantangan yang muncul, bahkan menciptakan institusi alternatif jika terdapat peluang. Hal ini tergambar dalam keterlibatan Tiongkok di WTO dan Bank multilateral, namun di saat yang bersamaan juga memberikan tantangan terhadap tata kelola ekonomi global seperti penolakan perubahan statusnya sebagai ‘negara berkembang’ dan penolakan bergabung ke dalam Paris Club - forum negara-negara maju yang bekerja sama menangani masalah pembayaran utang negara berkembang atau dikenal dengan ‘*creditor countries*’.

Untuk menjelaskan strategi Tiongkok dalam tata kelola ekonomi global, Heldt dkk. menyajikan kerangka konseptual, diantaranya *deep cooperation*, yaitu ketika

¹⁴ Eugénia C Heldt, Henning Schmidtke, and Omar Serrano Oswald, “Multilateralism à La Carte: How China Navigates Global Economic Institutions,” *Review of International Political Economy*, 2025, 1–23.

Tiongkok secara aktif mendukung institusi ekonomi multilateral dan menyesuaikan diri terhadap aturan, norma dan prinsip-prinsip yang ada sehingga menunjukkan perannya sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab; *Deep challenge*, menunjukkan strategi yang secara aktif mengganggu hingga menyusun ulang tata kelola ekonomi multilateral. Dalam strategi ini sudah muncul adanya penolakan terhadap aturan yang ada, upaya penghambatan reformasi lembaga, bahkan menciptakan institusi pesaing; *Shallow support*, menunjukkan komitmen yang rendah. Melalui strategi ini, Tiongkok tetap mematuhi peraturan dan prinsip yang ada namun tidak menunjukkan dukungannya dalam pengembangan institusi, penegakan aturan, atau kerja sama yang lebih dalam; Dan *shallow resistance*, yaitu bentuk oposisi Tiongkok yang menantang bagaimana aturan multilateral diterapkan daripada menolaknya secara langsung, disini Tiongkok mengupayakan adanya reformasi tanpa sepenuhnya menolak kerangka kerja yang sudah ada. Di balik strategi Tiongkok yang bervariasi dalam institusi ekonomi multilateral, penulis menemukan faktor-faktor pendukung, yaitu kepentingan domestik (*domestic preference*), kemampuan domestik (*domestic capabilities*), dan lingkungan strategis internasional yang lebih luas (*the broader international strategic environment*).

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam memahami strategi negara dengan kemampuan ekonomi yang lebih kuat dari negara lainnya berinteraksi di dalam institusi multilateral, khususnya di sektor ekonomi. Di dalam artikel ini, penulis menunjukkan strategi-strategi Tiongkok yang sangat bervariasi dan mencoba melihat faktor pendukungnya melalui tiga bentuk. Hal ini membantu peneliti dalam menganalisis

strategi AS sebagai negara kuat dalam institusi multilateral, yang mana dalam penelitian ini membahas NAFTA.

Sumber rujukan terakhir yang digunakan peneliti yaitu karya Ferdi De Ville, Simon Happersberger, dan Harri Kalimo yang berjudul “*The Unilateral Turn in EU Trade Policy? The Origins and Characteristics of the EU’s New Trade Instruments*”.¹⁵ Kajian ini membahas pergeseran kebijakan perdagangan Uni Eropa (UE) ke arah yang lebih unilateral melalui beberapa kebijakan dagang yang baru, seperti *Enforcement Regulation*, *International Procurement Instrument*, dan *Anti-Coercion Instrument*. Adapun pergeseran ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketegangan geopolitik, perubahan struktur kekuatan global, kekecewaan terhadap WTO yang dinilai semakin melemah, serta persaingan ekonomi yang dipicu oleh aksi proteksionis dari mitra dagang yang semakin meningkat.

Penetapan *open strategic economy* oleh UE ini menimbulkan reaksi yang diiringi kemarahan dari negara-negara berkembang. Pasalnya dalam kebijakan ini negara-negara berkembang harus mematuhi serangkaian regulasi yang sesuai standar UE untuk bisa memasuki pasar UE, hal ini juga dinilai merupakan suatu bentuk proteksionisme tersembunyi yang dilakukan oleh UE. Penulis menyoroti bahwa kegagalan WTO dalam menyelesaikan tantangan ekonomi global di masa kini membuat pendekatan unilateralisme menjadi pilihan yang lebih menjanjikan.

¹⁵ Ferdi De Ville, Simon Happersberger, and Harri Kalimo, “The Unilateral Turn in EU Trade Policy? The Origins and Characteristics of the EU’s New Trade Instruments,” *European Foreign Affairs Review* 28 (2023): 15–34.

1.7 Kerangka Konseptual

Menurut Mohtar Mas'ood, konsep berperan penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran tersebut.¹⁶ Melalui kerangka konsep, peneliti dapat menunjukkan hubungan antar komponen dalam penelitian serta landasan pemikiran yang digunakan.

1.7.1 Kekuasaan (*Power*)

Ketika membahas interaksi antar negara dalam sistem internasional, kekuasaan negara selalu menjadi topik utama. James Lee Ray menekankan bahwa *power* tidak sekadar berarti kepemilikan sumber daya, melainkan kemampuan suatu aktor untuk memengaruhi perilaku aktor lain agar mencapai tujuan lain yang mungkin lebih tinggi atau berjangka lebih panjang.¹⁷ Dengan kata lain, *power* harus dilihat dari kemampuan nyata (*actual capacity*) untuk mengubah tindakan pihak lain, bukan hanya dari potensi yang dimiliki.

Ray berpendapat bahwa konsep *power* bersifat multidimensional. Artinya, kekuatan suatu negara tidak bisa dipahami hanya dari satu indikator, misalnya militer atau ekonomi semata, tetapi harus dilihat secara bersamaan. Dalam tulisannya yang berjudul "*Measuring the Concentration of Power in the International System*", Ray mengemukakan bahwa terdapat tiga dimensi untuk mengukur kekuatan negara (*power potential-index*).¹⁸ Pertama, dimensi demografis. Ray menjelaskan terdapat dua

¹⁶ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990): 95.

¹⁷ Mohtar Mas'ood, 119.

¹⁸ James Lee Ray and J. David Singer, "Measuring the Concentration of Power in the International System," *Sociological Methods & Research* 1, no. 4 (1973): 403–37.

indikator dalam dimensi ini, yaitu jumlah total penduduk suatu negara secara keseluruhan, dan total penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Dimensi demografis ini dianggap penting dalam membentuk kekuatan nasional.

Kedua, dimensi industri. Jumlah penduduk akan memengaruhi konsumsi energi suatu negara. Dengan begitu, maka akan meningkat pula produksi barang-barang industri seperti baja yang menjadi komponen penting pengembangan industri lainnya. Bagi negara, tingginya tingkat produksi industri juga berguna dalam pengembangan teknologi senjata untuk mendukung pertahanan militer. Ketiga, dimensi militer. Walaupun Ray menekankan pentingnya industri dan demografi, ia tetap menempatkan militer sebagai salah satu unsur utama dalam *power*. Dimensi ini meliputi jumlah personel dan proporsi belanja militer dalam anggaran belanja negara. Kekuatan militer dianggap penting karena memberikan jaminan keamanan terhadap ancaman eksternal sekaligus alat efektif dalam menunjukkan kekuatan negara

Dengan demikian, konsep *power* menurut James Lee Ray memperlihatkan bahwa kekuasaan negara bukanlah entitas tunggal atau statis. Ia merupakan gabungan dari faktor demografis, ekonomi, dan militer yang terus berubah seiring perkembangan domestik maupun dinamika internasional. Pendekatan multidimensional ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi relatif negara dalam sistem internasional. Dalam penelitian ini, konsep kekuasaan digunakan untuk mengukur kekuatan negara anggota NAFTA dibalik perilaku negara dalam proses renegosiasi, terutama AS.

1.7.2 *Suasion Game*

Berdasarkan prinsip multilateralisme yang dikemukakan oleh Rugie, kerjasama multilateral mensyaratkan agar negara-negara mengorbankan tingkat fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan menahan diri dari pengambilan keputusan dengan dampak jangka pendek demi manfaat jangka panjang (*diffuse reciprocity*). Dari prinsip ini maka akan menciptakan institusi multilateral yang persebaran kekuatan antar negara anggotanya bersifat setara. Namun menurut Lisa L. Martin, interaksi antar negara dalam kerja sama multilateral tidak selalu sesuai dengan prinsip tersebut.

Dalam teori permainan (*game theory*), permasalahan yang terdapat dalam kerja sama multilateral diklasifikasikan Martin ke dalam empat jenis, kolaborasi (*collaboration*), koordinasi (*coordination*), bujukan (*suasion*), dan jaminan (*assurance*). Dalam permasalahan bujukan (*suasion problem*), terjadi ketidakseimbangan kekuasaan (*asymmetry power*) antar negara anggota di dalam institusi multilateral, yang mana terdapat dominasi negara kuat atas negara yang lebih lemah. Aktor yang memiliki kekuatan lebih besar, yang disebut Martin sebagai hegemon, merupakan negara tunggal yang dihadapkan pada situasi di mana harus memastikan negara lain di dalam institusi multilateral untuk kooperatif. Strategi yang dilakukan oleh hegemon inilah yang disebut Martin sebagai *suasion game*.

Konsep *Suasion Game* dalam kajian hubungan internasional menggambarkan dinamika interaksi yang asimetris. Model ini melibatkan dua pihak utama: pertama, hegemon yang memiliki kekuatan lebih dan awalnya cenderung memiliki sedikit minat untuk bekerjasama, namun tetap lebih memilih untuk berkooperasi demi pembagian beban tanggung jawab terhadap suatu isu; dan kedua, pihak yang lebih lemah yang

memiliki sedikit pilihan selain bekerjasama demi menghindari kerugian yang lebih besar. Dalam kerja sama multilateral, hegemon menjadi pihak yang secara aktif dan sukarela menanggung beban untuk menjaga kepentingan bersama, misalnya dengan menjamin keamanan regional atau menjaga stabilitas ekonomi global. Karena kemampuan besar yang dimiliki oleh hegemon tersebut, negara-negara lain yang ikut dalam kerjasama ini biasanya hanya akan menerima peran tersebut dan tidak perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menyeimbangi kekuatan hegemon. Martin menyebutnya negara tersebut sebagai “*free rider*”. Dan hubungan antara hegemon dan *free rider* ini disebut dengan *unreciprocated cooperation* atau kerjasama tidak berbalas, di mana hegemon bersedia menyediakan kebutuhan bersama dan *free rider* tidak membalas kontribusi tersebut. Karena kerjasama yang setara tidak muncul secara alami, hegemon harus menggunakan taktik permainan agar *free rider* mau berkontribusi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *suasion game* atyang dikemukakan oleh Lisa L. Martin. Dalam tulisannya yang berjudul “*Interest, Power, and Multilateralism*”, Martin menggambarkan kondisi suatu institusi multilateral yang mana didalamnya terdapat negara hegemon dan negara kecil. Untuk menjelaskan pengertian negara hegemon, Martin mengacu pada definisi hegemon oleh Charles P. Kindleberger, Steven D. Krasner, dan Robert O. Keohane, bahwa situasi yang menunjukkan adanya kemungkinan bagi negara tunggal yang dominan untuk menyediakan kebutuhan umum (*public good*) dan dengan demikian memiliki kelebihan untuk memaksakan solusi atas isu-isu yang bersifat kolektif. Martin menjelaskan bahwa ketergantungan suatu negara kepada negara lain memberikan kekuatan yang

lebih besar kepada negara tersebut. Sebagai contoh, negara P memiliki ketergantungan terhadap negara Q di sektor tertentu, ketergantungan tersebut memberikan kekuatan lebih besar terhadap negara Q.

Ciri khas dari *suasion game* adalah adanya hasil tunggal yang hanya memuaskan satu aktor, sementara aktor lain dirugikan atau tidak mendapatkan hasil yang sama (equilibrium). Dengan kata lain, hanya satu pihak yang memperoleh keuntungan optimal, sedangkan pihak lain harus menerima kerugian atau hasil yang kurang menguntungkan. Gambar di bawah ini merupakan bagan yang dijelaskan Lisa L. Martin dalam permainan bujukan (*suasion game*).

		Actor B	
		C	D
Actor A	C	4,3	3,4*
	D	2,2	1,1

Gambar 1. 1 *Suasion Game*. Angka sebelum tanda koma adalah milik A, (1= hasil terburuk; 4= hasil terbaik). *Equilibrium

Sumber: Alexander Betts, Global Economic Governance Programme.

Gambar diatas merupakan ilustrasi *suasion game*. Dalam tulisan yang berjudul “*International Cooperation in the Refugee Regime*”, Alexander Betts, mencoba menjelaskan antara kerjasama negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dalam rezim perlindungan pengungsi.¹⁹ Dengan menggunakan konsep *suasion game* yang dikembangkan oleh Martin, Betts menjelaskan hubungan antar negara-negara

¹⁹ Alexander Betts, “International Cooperation in the Global Refugee Regime,” vol. 44, 2008.

tersebut. Dalam tulisan itu, Aktor B mewakili negara hegemon dan aktor A sebagai *free rider*. Huruf C pada bagan tersebut mewakili *cooperation* atau kerjasama, dan D mewakili *defection* atau pembelotan. Dalam *suation game*, equilibrium (CD) merupakan hasil ideal dari interaksi antara hegemon dan *free rider*. Yaitu untuk mendorong A bekerjasama (C), hegemon harus membelot (D). Dari strategi permainan ini, A mendapatkan hasil (3), dan B mendapatkan (4). Dan untuk mencapai hasil ini, strategi yang hegemon gunakan dapat berupa pemberian ancaman maupun insentif terhadap B.

Meskipun (CD) memberikan hasil yang lebih rendah kepada A, angka tersebut merupakan hasil terbaik jika dibandingkan dengan hasil ketika kedua pihak sama-sama membelot (DD). Sehingga, untuk mendapatkan hasil (CD), strategi hegemon untuk meningkatkan kerjasama A haruslah tepat, atau bersifat kredibel. Jika strategi yang digunakan B tidak berhasil, dan A tetap memilih *defect*, maka kedua pihak sama-sama akan mendapatkan hasil terburuk (1,1). Sehingga meninggalkan pilihan bagi aktor A yaitu antara harus menerima keuntungan yang lebih kecil (CD) atau menolak kerjasama sepenuhnya, namun menanggung kerugian yang lebih besar (DD).

Dalam upaya mencapai hasil CD, negara B akan melakukan taktik pengaitan isu (*tactical issue linkage*) untuk meningkatkan daya tarik kerjasama atau menurunkan kecenderungan pembelotan. Taktik ini dapat dibagi kedalam dua bentuk instrumen, yaitu ancaman (*threats*) dan insentif (*side-payments*).²⁰ Martin berpandangan bahwa

²⁰ Lisa L. Martin, "Interests, Power, and Multilateralism," *International Organization* 46, no. 4 (1992): 779.

dalam memahami terbentuknya suatu kerja sama, terdapat kaitannya dengan isu lain di luar isu utama, sehingga mendorong kerjasama dari negara lain.

(1) Instrumen Ancaman (*threat*)

Bentuk pertama, negara B dapat menggunakan instrumen ancaman untuk membujuk negara lain. Lisa L. Martin menjelaskan bahwa ancaman adalah suatu taktik yang diberikan hegemon ketika negara lain tidak mau bekerjasama. Akan tetapi, untuk mencapai keberhasilannya, ancaman haruslah bersifat kredibel dan hegemon harus bersiap menanggung biaya dari ancaman yang telah diberikan. Ancaman sendiri digunakan untuk mengurangi manfaat dari aksi pembelotan (*defection*) yang berpotensi dilakukan oleh *free rider*. Ancaman dalam *suasion game* digunakan hegemon secara sepihak untuk memastikan *free rider* bersikap kooperatif (*cooperate*), seperti menetapkan upaya proteksionis dan hambatan perdagangan, hingga penarikan diri dari organisasi.

Untuk berhasil membuat *free rider* bekerjasama, hegemon harus memastikan kredibilitas ancaman yang diberikan. Untuk mencapai kredibilitas tersebut, Martin mengemukakan dua mekanisme, yaitu sanksi berbiaya tinggi (*high cost sanction*) dan penggunaan institusi internasional (*the use of international institution*). Hegemon menggunakan ancaman yang direalisasikan melalui *high cost sanction* dan di bawah payung institusi. Kedua mekanisme ini (sanksi berbiaya tinggi dan penggunaan institusi) bersama-sama meningkatkan potensi biaya domestik (*audience cost*) – yaitu hukuman politik yang dihadapi hegemon di dalam negeri dan di level global jika ancaman

tersebut dicabut. Dengan adanya biaya domestik (*audience costs*), hegemon menunjukkan kepada *free rider* bahwa ancaman yang diberikan bersifat kredibel.²¹

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa ancaman yang diberikan memiliki biaya domestik, efek dari ancaman yang diberikan hegemon juga akan dirasakan oleh hegemon itu sendiri.²² Sebagai contoh yaitu pemberian ancaman oleh AS kepada negara-negara Eropa Barat dalam krisis pipa gas tahun 1982. Dalam konflik tersebut, AS menentang proyek pembangunan pipa gas dari Uni Soviet menuju Eropa karena khawatir akan meningkatkan ketergantungan Eropa terhadap Uni Soviet. AS kemudian mengancam akan memberikan *countersanctions* (sanksi terhadap sekutu) terhadap perusahaan Eropa yang tetap terlibat agar mengikuti kebijakan AS dengan membatalkan proyek tersebut. Kebijakan ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara AS dan negara-negara Eropa yang merupakan sekutu dekat AS. Namun dikarenakan ancaman tersebut hanya berupa tekanan tanpa biaya domestik tinggi, akhirnya AS mencabut ancamannya dan proyek tetap diselesaikan. Krisis ini menjadi contoh penggunaan ancaman sebagai instrumen *suasion game* yang gagal.

(2) Instrumen Insentif (*Side-payment*)

Instrumen kedua yang digunakan hegemon adalah insentif (*side-payment*). Insentif merupakan suatu bentuk imbalan atau kompensasi yang

²¹ Lisa L. Martin, "Credibility, Costs, and Institutions: Cooperation on Economic Sanctions," *World Politics* 45, no. 3 (1993): 413-16, <https://doi.org/10.2307/2950724>.

²² Lisa L. Martin, "Credibility, Costs, and Institutions: Cooperation on Economic Sanctions," *World Politics* 45, no. 3 (1993): 412.

diberikan oleh hegemon kepada *free rider* untuk meningkatkan pilihan bekerjasama.²³ Berbeda dengan instrumen ancaman yang tujuannya merugikan *free rider*, instrumen insentif digunakan hegemon untuk meningkatkan keuntungan yang diterima *free rider* dari bentuk kerjasama, sehingga negara tersebut lebih memilih bekerjasama daripada sekedar menjadi penumpang gratis (*free-riding*).

Martin menjelaskan bahwa untuk berhasil membuat *free rider* bekerjasama, hegemon juga menggunakan mekanisme insentif berbiaya tinggi dan di bawah payung institusi untuk menciptakan biaya domestik dari insentif yang diberikan. Dengan adanya biaya domestik (*audience costs*), hegemon menunjukkan kepada *free rider* bahwa insentif yang diberikan bersifat kredibel.²⁴

Pada dasarnya, instrumen ini melibatkan transfer manfaat dari negara B kepada negara A.²⁵ Sebagai contoh, pada tahun 1990, AS memimpin upaya pemberian sanksi ekonomi kepada Irak yang melakukan invasi di Kuwait. Namun, Yordania dan Mesir melakukan penolakan atas upaya AS tersebut. Untuk mendorong kerjasama dari kedua negara tersebut, AS melakukan pengurangan utang yang kedua negara tersebut miliki dengan AS. Dari taktik ini, AS sebagai negara B berhasil mencapai kepentingannya yaitu kerjasama

²³ Martin, "Credibility, Costs, and Institutions: Cooperation on Economic Sanctions," 411.

²⁴ Lisa L. Martin, "Credibility, Costs, and Institutions: Cooperation on Economic Sanctions," *World Politics* 45, no. 3 (1993): 413-16, <https://doi.org/10.2307/2950724>.

²⁵ Lisa L. Martin, "Credibility, Costs, and Institutions: Cooperation on Economic Sanctions," *World Politics* 45, no. 3 (1993): 411.

Yordania dan Mesir meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, dan kedua negara tersebut meskipun harus mengikuti permainan AS, keduanya tetap mendapatkan manfaat berupa pengurangan utang. Contoh ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kerjasama Yordania dan Mesir, AS juga mengeluarkan biaya domestik berupa pengurangan total utang yang seharusnya dibayarkan oleh kedua negara tersebut.

Martin menjelaskan bahwa bagi negara A, menjaga hubungan multilateralisme merupakan hal yang sangat penting demi mendukung tercapainya kepentingan domestik. Dan bagi negara B, institusi multilateralisme sangat berguna untuk upaya mencapai kepentingan bersama dengan adanya pembagian beban tanggungjawab. Meskipun multilateralisme mengandung prinsip-prinsip yang menunjukkan kesetaraan, pada kenyataannya kendali agenda dan keputusan tetap dipegang oleh hegemon.²⁶ Kesenjangan kekuasaan dalam *suasion game* menunjukkan bahwa kerjasama multilateralisme memberikan perlindungan bagi negara-negara kecil, tetapi akan memberikan ruang yang sempit bagi negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Proses renegotiasi NAFTA menunjukkan situasi *suasion game* karena diiringi dengan serangkaian permainan bujukan oleh AS untuk memastikan Kanada dan Meksiko mau menyepakati perjanjian baru yaitu USMCA. Dengan demikian, pemetaan kekuasaan menggunakan konsep *power* dari James Lee Ray memberikan gambaran awal mengenai distribusi kapabilitas di antara negara-negara anggota

²⁶ Martin, "Interests , Power , and Multilateralism," 779.

NAFTA. Analisis ini menunjukkan posisi dominan AS yang secara relatif lebih unggul dibanding Kanada dan Meksiko, sehingga dapat dikategorikan sebagai hegemon dalam kawasan tersebut. Sementara itu, konsep *suasion game* dari Lisa L. Martin digunakan untuk melanjutkan analisis dengan menjelaskan bagaimana negara hegemon tersebut memanfaatkan posisinya melalui mekanisme ancaman maupun *side-payment* dalam proses negosiasi.

Kedua konsep ini digunakan untuk saling melengkapi, dimana Ray menyediakan pijakan untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki kekuatan dominan, sedangkan Martin menjelaskan bagaimana kekuatan tersebut diartikulasikan dalam interaksi antarnegara di institusi multilateralisme. Dengan kombinasi keduanya, analisis terhadap dinamika renegotiasi NAFTA menjadi lebih utuh, karena tidak hanya mengidentifikasi aktor dominan, tetapi juga memahami strategi yang digunakan untuk mempertahankan dominasi suatu negara.

1.8 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah metode untuk mengolah data yang ditemukan oleh peneliti. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.²⁷ Menurut Rifa'i Abubakar, metodologi penelitian merupakan proses penyelidikan dan penelusuran suatu masalah dengan menerapkan pendekatan ilmiah secara teliti dan hati-hati untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk

²⁷ Tuti Khairani Harahap Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁸ Dalam penelitian studi hubungan internasional, metodologi penelitian dibutuhkan untuk membantu peneliti dalam memahami kajian hubungan internasional yang sebelumnya sudah terdapat banyak sudut pandang. Metodologi berperan sebagai pembatas bagi peneliti agar menghasilkan kajian yang lebih tajam dan khusus.²⁹

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini mengandung analisis yang mendalam tanpa menggunakan pendekatan ilmiah yang menggunakan angka. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami kepercayaan, pengalaman, perilaku dan interaksi yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak berkaitan dengan angka.³⁰ Terdapat dua tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³¹ Guna melakukan penelitian yang mendalam, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk menganalisis data dan fakta yang ditemukan agar kemudian diberikan penjabaran dan penjelasan lebih lanjut terkait pengimplementasian instrumen unilateralis oleh AS dalam proses renegotiasi NAFTA menjadi USMCA.

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

²⁹ Christopher Lamont, *Methodology and Methods in International Relations, Research Methods in International Relations*, 2021.

³⁰ Vibha Pathak, Bijayini Jena, and Sanjay Kalra, "Qualitative Research," *Perspectives in Clinical Research* 4, no. 3 (2013): 192.

³¹ Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 27.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pembahasan utama di penelitian ini bertumpu pada pengaruh dominasi AS di kawasan Amerika Utara terhadap terganggunya nilai multilateralisme dalam kerja sama internasional yang tercermin dalam renegotiasi NAFTA. Peneliti menetapkan batasan waktu yaitu tahun 2016 yang merupakan tahun di mana Trump sudah menyampaikan keinginannya melakukan renegotiasi NAFTA hingga tahun 2020 sebagai tahun diresmikannya USMCA.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis dan unit eksplanasi merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Margaret Roller, unit analisis merujuk pada unsur utama yang menjadi landasan penelitian.³² Sebagai unsur utama, unit analisis dapat dikatakan memiliki peran sebagai variabel dependen suatu penelitian yang membutuhkan variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi variabel dependen itu sendiri. Unit Eksplanasi merupakan variabel independen yang mempengaruhi unit analisis atau dampak terhadap unit analisis yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini terletak pada AS sebagai aktor negara dengan ketimpangan kekuasaan di antara anggota NAFTA sebagai unit eksplanasi.

Unsur penting lainnya dalam suatu penelitian hubungan internasional yaitu level analisis. Untuk menetapkannya, peneliti dapat mengkorelasikan level analisis penelitiannya sesuai dengan unit analisis dan unit eksplanasi. Kenneth Waltz membagi level analisis ke dalam tiga tingkatan, yaitu sistem internasional, negara dan individu.

³² Margaret R. Roller, "Qualitative Research : Analysis Research Design Review Published in 2019," *Research Design Review*, 2020, 1–8.

Pada level sistem internasional, Waltz menjelaskan bahwa sistem internasional bersifat anarkis. Ketidakhadirannya pemerintah pusat di sistem internasional memicu negara untuk berperilaku berdasarkan kepentingan nasional negaranya, termasuk distribusi kekuatan dan hubungan antar negara. Di level kedua yaitu negara yang berfokus pada skala internal dari negara itu sendiri yang dapat dilihat dari bentuk pemerintahan, ideologi dan ekonominya. Menurut Waltz, walaupun negara berada dalam sistem yang sama, perbedaan struktur internal dapat mengeluarkan kebijakan luar negeri yang berbeda. Misalnya dalam menghadapi suatu fenomena internasional, negara demokratis dan negara sosialis yang secara ideologi sudah berbeda, maka akan memberikan reaksi terhadap fenomena tersebut juga dengan pendekatan yang berbeda.

Level ketiga yaitu individu yang berfokus pada peran pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri. Terkadang dalam pengambilan suatu keputusan, karakter dari individu yang mengeluarkan kebijakan (yang dalam hal ini merupakan pemimpin negara) juga menjadi faktor utama hadirnya keputusan tersebut.³³ Penelitian ini menggunakan level analisis sistem internasional yang nantinya akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip unilateralisme diimplementasikan oleh AS sebagai negara dominan di kawasan Amerika Utara sehingga mempengaruhi keputusan Kanada dan Meksiko untuk menyetujui dilakukannya renegotiasi NAFTA.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan aspek utama yang tidak bisa diabaikan, tanpa adanya data yang cukup dan sesuai maka akan berdampak besar terhadap nilai

³³ Kenneth N., "Theory of International Politics," *Theory of International Politics*, 2017.

ilmiah penelitian tersebut. Untuk menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder (*secondary data*) dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Dengan teknik ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, artikel jurnal, dokumen arsip, laman resmi, majalah dan bacaan literatur lainnya yang berhubungan dengan isu terkait. Untuk uraian secara lebih spesifik, peneliti mengandalkan artikel-artikel yang diterbitkan oleh *The American Journal of International Law*, *Congressional Research Service*, *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, *Journal of Public Economics*, *European Foreign Affairs Review*, *Policy Center for the New South*, *International Organization*, *Global Perspective*, *International Affairs*, *World Politics*, *Review of International Political Economy* dan lainnya. Selain itu peneliti juga mengacu pada situs resmi pemerintah AS (*Congress.gov*).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka berikutnya yang dilakukan berikutnya yaitu melakukan analisis. Neil Armstrong mengatakan bahwa penelitian merupakan suatu langkah dalam menciptakan pengetahuan baru.³⁴ Oleh sebab itu, ketepatan teknik analisis data sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Teknik analisis data merupakan proses penjabaran, klasifikasi, dan penyelarasan antara studi kasus dengan konsep penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat tahapan analisis data menurut Caroline Graue yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan diakhiri

³⁴ Carolin Graue, "Qualitative Data Analysis," *International Journal of Sales, Retailing & Marketing* 4, no. 9 (2015): 5–13.

dengan kesimpulan.³⁵ Tahap pertama yaitu pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh dari melakukan studi kepustakaan. Tahap kedua yaitu penyederhanaan data-data yang diperoleh dengan melakukan pengkategorian atau dalam penelitian ini data-data yang ada nantinya akan disusun menyesuaikan topik pembahasan. Tujuan dari tahap ini adalah agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Lalu di tahap ketiga peneliti akan menampilkan dan merangkai hubungan dari setiap data yang ditemukan. Di tahap ini peneliti akan berhenti menjabarkan dan mulai menjelaskan data sesuai dengan konsep yang dipilih. Tahapan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan didukung oleh informasi aktual baik itu dari sumber data yang ada maupun pernyataan dari informan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, berisikan latar belakang masalah, pertanyaan, konseptual, hingga metode penelitian guna membantu pembaca untuk memahami dasar dari apa yang penulis bahas di bab berikutnya. Peneliti juga mencantumkan rumusan masalah, manfaat secara akademis dan praktis, tujuan penelitian, serta literatur-literatur dari penelitian sebelumnya guna membantu peneliti memahami penelitian ini lebih dalam.

³⁵ Graue, 11.

BAB II North American Free Trade Agreement

Pada bab II ini, peneliti membahas NAFTA yang meliputi awal pembentukan NAFTA, bagaimana dampak NAFTA terhadap ekonomi masing-masing negara anggota, serta bagaimana hubungan perdagangan antara AS-Kanada-Meksiko dalam konteks NAFTA.

BAB III Renegosiasi NAFTA

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data-data terkait renegosiasi NAFTA. Yaitu bagaimana prosesnya, dan juga respon Kanada dan Meksiko terhadap ketentuan-ketentuan baru yang diusulkan AS untuk perjanjian baru, yaitu USMCA. Bab ini akan menyajikan informasi terkait bagaimana proses dari renegosiasi NAFTA yang menghasilkan USMCA secara lebih lengkap dengan alur pre-renegosiasi, selama renegosiasi, dan pos-renegosiasi.

BAB IV Pengimplementasian Prinsip-Prinsip Unilateralisme Oleh Amerika Serikat Dalam Renegosiasi North American Free Trade Agreement

Bab IV adalah bagian inti dari penelitian ini. Disini, peneliti akan menjelaskan analisis topik penelitian dengan menggunakan kerangka konseptual yang peneliti sudah cantumkan sebelumnya, yaitu konsep *power* oleh James Lee Ray dan *suasion game* oleh Lisa Martin. Bab ini secara mendalam akan memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah diajukan, sehingga pembaca dapat mengetahui perilaku atau strategi yang digunakan oleh AS untuk mempengaruhi keputusan Kanada dan Meksiko sebagai negara mitra untuk menyetujui renegosiasi NAFTA menjadi USMCA.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang hanya berisikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan penelitian di bagian sebelumnya. Bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang peneliti tuliskan kepada pembaca dan peneliti lainnya agar dapat mengisi *gap* dalam penelitian ini dengan merujuk pada literatur lainnya. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka yang menjadi referensi untuk peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis topik pembahasan.

